

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI KOTA BEKASI

Herjuno Hadyan

NPP. 32.0890

Asdaf Kabupaten Bone , Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0890@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Anindita Primastuti, S.E, M.E

ABSTRACT

(Problem Statement/Background (GAP): Financial management and transparency are crucial for the accountability of government institutions. In the City of Bekasi, financial reports still exhibit shortcomings in asset management, capital expenditure reporting, and internal control systems. As a result, the Audit Board of Indonesia (BPK) issued a qualified opinion for the fiscal years 2021 to 2023. **Purpose:** This study aims to evaluate the quality of financial reports prepared by the Bekasi City Government and assess the implications these reports have on the audit opinions issued by BPK. The study also seeks to identify barriers to improving the quality of financial reports and to provide recommendations for enhancing the transparency and reliability of these reports. **Method:** The study employed a qualitative descriptive approach, with data collected from interviews, observations, and document analysis. The participants included staff from the BPKAD of Bekasi City, local government officials, and other relevant stakeholders. The analysis was grounded in Mahmudi's (2010) theory, assessing the financial reports based on the four dimensions: relevance, reliability, comparability, and understandability. **Result:** The study found that the quality of financial reporting in Bekasi City was moderate, with a performance rating that indicated areas for improvement. Key challenges include the lack of adequate reconciliation, asset management issues, and low public awareness regarding the importance of financial transparency. Although initiatives like mobile library services and school-based campaigns contributed positively, digital literacy remains a significant barrier. **Conclusion:** For Bekasi City to improve the quality of financial reporting and receive better audit opinions from BPK, it is essential to improve socialization efforts, invest in infrastructure, and increase public participation. Strengthening digital literacy and improving internal control systems are also crucial for enhancing transparency and accountability in financial management. **Keywords:** Audit Opinion, Financial Report, Relevant, Transparency, Realible.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan keuangan dan transparansi sangat penting untuk akuntabilitas lembaga pemerintah. Di Kota Bekasi, laporan keuangan masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan aset, pelaporan belanja modal dan sistem pengendalian internal sehingga Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2021-2023. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Bekasi. **Metode:** Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Peserta penelitian melibatkan staf dari BPKAD Kota Bekasi, pejabat pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Analisis dilakukan

berdasarkan teori Mahmudi (2010) dengan menilai laporan keuangan berdasarkan empat dimensi: relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan di Kota Bekasi tergolong sedang, dengan ruang untuk perbaikan di semua dimensi. Tantangan utama yang ditemukan meliputi masalah dalam ketepatan waktu dan kelengkapan data keuangan, inkonsistensi dalam penerapan standar pelaporan, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan tersebut. Namun, beberapa langkah positif telah dilakukan untuk meningkatkan keterbandingan laporan dari waktu ke waktu dan transparansi operasional keuangan. **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan hasil audit yang lebih baik, Pemerintah Kota Bekasi perlu fokus pada perbaikan ketepatan waktu, keandalan, dan pemahaman laporan keuangan. Selain itu, penyederhanaan penyajian laporan keuangan agar mudah dipahami oleh pemangku kepentingan dan masyarakat juga sangat penting. Penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen keuangan yang mendasar juga akan menjadi kunci dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik. **Kata kunci:** Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Opini Auditor, Relevan, Andal.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi cermin dari kinerja pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, penilaian kualitas laporan keuangan sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada public. Supervisi dalam pemerintahan merupakan salah satu fungsi manajerial yang sangat penting dalam operasional pemerintahan (Sudaryanto *et al*, 2020) Komite audit yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap prosedur pelaporan dan pengelolaan keuangan. (Kusnadi *et al*, 2016)

Di Kota Bekasi, meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan masih perlu diperbaiki. Audit eksternal yang dilakukan dapat memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, (Herda *et al*, 2014) hal ini juga tercermin dalam temuan di Kota Bekasi yang memperoleh opini WDP pada laporan keuangannya Berdasarkan opini audit BPK, laporan keuangan Kota Bekasi masih mencatatkan opini "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP), yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset dan pelaporan belanja modal. Kelemahan ini menjadi perhatian utama, karena berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Layanan non-audit yang diberikan auditor dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan melalui pengawasan yang lebih mendalam terhadap area yang perlu perbaikan. (Haji-Abdullah *et al*, 2017)

Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah berupaya untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan dengan berbagai kebijakan dan inovasi, salah satunya adalah dengan meningkatkan sistem pelaporan dan melakukan pelatihan bagi para pengelola keuangan daerah. Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian kualitas laporan keuangan yang optimal. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, serta kurangnya integrasi antara berbagai unit pengelola keuangan yang

menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan.

Tabel 1. 1
Opini BPK Kota Bekasi 2019-2023

No	LKPD (Tahun)	Opini
1	2019	WTP
2	2020	WTP
3	2021	WDP
4	2022	WDP
5	2023	WDP

Sumber: BPK, 2019-2023

Pada tahun 2019 dan 2020, Pemerintah Kota Bekasi mendapat opini "WTP", yang menunjukkan laporan keuangan disajikan secara wajar. Namun, pada 2021 dan 2022, opini berubah menjadi "WDP" karena temuan masalah penatausahaan dan pengamanan aset tanah, serta kewajaran aset yang belum dapat dipastikan. Di tahun 2023, temuan kembali mencatat kelebihan pembayaran belanja modal yang baru sebagian terpulihkan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Bekasi dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK. Penelitian ini juga akan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu kesenjangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah rendahnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Meskipun Pemerintah Kota Bekasi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2019 dan 2020, sejak 2021 hingga 2023, opini audit berubah menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menunjukkan adanya masalah signifikan dalam pengelolaan aset dan pelaporan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan telah dilakukan, masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset yang mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK.

Kesenjangan lainnya terletak pada kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi yang berlaku, yang menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun pelatihan telah diberikan, banyak pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya menguasai standar akuntansi pemerintah, sehingga menurunkan kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Selain itu, meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan aset, khususnya aset tanah yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bekasi, masih banyak aset yang tidak tercatat dengan benar. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan dan mengurangi keandalan laporan tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK.

Kesenjangan berikutnya adalah integrasi sistem informasi keuangan yang belum sepenuhnya terwujud antara unit pengelola keuangan yang berbeda. Keterbatasan integrasi ini menyebabkan kesulitan dalam memperoleh data yang tepat dan akurat, yang mengarah pada

inkonsistensi dalam pelaporan keuangan. Padahal, sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Lebih lanjut, meskipun terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan, masih terdapat kendala dalam keterbandingan antara laporan keuangan tahun sebelumnya dengan laporan keuangan tahun berjalan. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam penerapan standar akuntansi yang konsisten di berbagai unit pengelola keuangan, yang membuat laporan keuangan sulit untuk dibandingkan secara efektif.

Penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Bekasi masih sangat terbatas, khususnya yang mengkaji secara mendalam tentang pengelolaan aset, kompetensi SDM, dan integrasi sistem informasi keuangan di daerah dengan tantangan pengelolaan keuangan yang kompleks. Hal ini menciptakan research gap yang perlu diisi, yakni bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan dan implementasi sistem informasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di daerah yang menghadapi tantangan administratif dan pengelolaan keuangan yang terbatas.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan pentingnya berbagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan dan kualitas laporan keuangan tersebut. Wahyu Setiyono (2016) dalam penelitiannya mengindikasikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan daerah. Dalam studi ini, digunakan pendekatan kuantitatif kausal yang menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut secara terpisah mempengaruhi kualitas laporan.

Sementara itu, Gusherinsya dan Samukri (2020) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif serta kausalitas, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan standar yang tepat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Rohila Apriani dan Henny Yulsiati (2024) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan terhadap opini audit. Mereka menemukan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap opini audit, yang berarti semakin tepat waktu penyampaian laporan, semakin baik opini audit yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dan menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam meningkatkan opini audit.

Selanjutnya, Rifqiansyah, Munir, dan Afrianto (2023) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menggunakan metode kuantitatif dengan prosedur statistik, mereka menilai bahwa kedua faktor ini merupakan elemen kunci dalam menentukan kualitas laporan keuangan yang akurat dan transparan.

Penelitian lain yang relevan adalah oleh Ermawati et al. (2020), yang meneliti pengaruh kualitas audit dan komite audit terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki

hubungan positif dan signifikan dengan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan yang menekankan pentingnya audit yang berkualitas dalam memastikan akuntabilitas laporan keuangan.

Dalam studi internasional, Sabo et al. (2024) melakukan penelitian tentang adopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) di Nigeria dan menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, keterbandingan, dan representasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di sektor publik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei dan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh IPSAS terhadap kualitas laporan keuangan.

Terakhir, Gardi et al. (2021) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di wilayah Kurdistan menunjukkan bahwa faktor hukum, bisnis, independensi, pengendalian kualitas, dan regulasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Mereka menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk memahami hubungan antara faktor-faktor ini dan kualitas laporan keuangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam mengkaji kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan yang mengadaptasi dimensi kualitas laporan keuangan dari Mahmudi (2010), yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penelitian ini menjadi salah satu yang pertama yang secara spesifik mengevaluasi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan kerangka dimensi tersebut. Hal ini memberikan kontribusi penting dalam kajian evaluasi kualitas laporan keuangan di daerah yang menghadapi tantangan administratif dan pengelolaan keuangan yang kompleks.

Penelitian ini juga unik karena tidak hanya menilai keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan, tetapi juga mengevaluasi hambatan-hambatan struktural dan kultural yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa kendala yang diperhatikan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, serta kurangnya koordinasi antara berbagai unit pengelola keuangan. Fokus pada evaluasi kebijakan implementatif ini memberikan kontribusi empiris yang jarang ditemukan dalam studi-studi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada desain kebijakan atau kebijakan yang diterapkan di daerah dengan infrastruktur yang lebih kuat.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan menawarkan rekomendasi berbasis temuan empiris kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan dan mengatasi masalah yang ada pada pengelolaan aset serta pelaporan belanja modal. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memperhatikan dimensi relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kota Bekasi

II. METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelola aset dan pelaporan belanja modal. Pendekatan ini dipilih karena tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, serta untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di daerah tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi faktual yang ada, kebijakan yang diterapkan, dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan keadaan yang ada secara komprehensif, termasuk tantangan yang dihadapi oleh BPKAD dalam mengelola aset dan pengeluaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit yang diterima oleh Pemerintah Kota Bekasi. Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Menurut Simangunsong (2017:190), penelitian deskriptif kualitatif dapat menyesuaikan dengan dinamika lapangan, sehingga peneliti dapat mengakomodasi perubahan informasi yang terjadi selama proses pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan dari pejabat terkait di BPKAD serta auditor mengenai pengelolaan laporan keuangan dan temuan audit yang ada. Observasi dilakukan untuk memantau implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait kebijakan pengelolaan keuangan, laporan tahunan, dan temuan audit yang diterbitkan oleh BPK.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala BPKAD Kota Bekasi, pegawai BPKAD Kota Bekasi, dan pejabat pengelola keuangan daerah. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan dan program pengelolaan keuangan. Sedangkan informan pendukung dipilih menggunakan teknik Snowball Sampling, yaitu melalui rekomendasi dari informan utama untuk menggali pandangan masyarakat atau pihak terkait yang memiliki informasi relevan.

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, serta beberapa lokasi yang terkait dengan pengelolaan aset dan belanja modal, seperti kantor pemerintahan daerah dan lokasi proyek pengadaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kualitas Laporan Keuangan Kota Bekasi dan Dampaknya pada Opini Audit BPK

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diberikan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi selama periode 2019 hingga 2023 mengalami perubahan, dimulai dengan opini *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) pada tahun 2019 dan 2020, dan beralih menjadi *Wajar Dengan Pengecualian* (WDP) pada tahun 2021 hingga 2023. Perubahan ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan aset dan pelaporan belanja modal yang belum memenuhi standar yang diharapkan.

Dalam menganalisis kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kami mengacu pada teori kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010), yang mencakup empat dimensi utama: relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penilaian berdasarkan dimensi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kinerja BPKAD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

1. Relevansi: Laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi secara umum telah terpenuhi dengan baik. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan setiap tahunnya, serta pemanfaatan data keuangan, seperti realisasi PAD dan belanja daerah, untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi anggaran di tahun berikutnya. Informasi yang disajikan dalam laporan juga memiliki nilai prediktif dan umpan balik yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal.
2. Keandalan: Penurunan opini dari WTP menjadi WDP menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan secara keseluruhan cukup dapat dipercaya, terdapat ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset yang membuat laporan tersebut tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Faktor pengelolaan aset tanah yang belum tercatat dengan baik menjadi salah satu penyebab utama.
3. Dapat dibandingkan: Laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dinilai telah terpenuhi dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui konsistensi penyajian laporan keuangan dari tahun ke tahun, baik dari segi struktur, metode akuntansi, maupun format pelaporan. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah yang ditampilkan selama tahun 2021 hingga 2023 memungkinkan analisis tren kinerja secara berkelanjutan.
4. Dapat dipahami: Laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan bahwa secara umum struktur laporan telah disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sehingga secara teknis sudah memenuhi unsur keterpahaman. Namun demikian, pada praktiknya masih terdapat kendala dalam keterbatasan kompetensi teknis dari sebagian penyusun laporan, yang bukan berasal dari latar belakang akuntansi, turut menjadi faktor penghambat dalam menghasilkan laporan yang benar-benar komunikatif.

Tabel 3.1**Dimensi Teori Mahmudi**

Dimensi	Indikator	Nilai/Status	Analisis
Relevansi	Ketepatan waktu laporan, nilai prediktif, nilai umpan balik	Sangat Baik	Laporan disusun tepat waktu dan digunakan untuk perencanaan serta evaluasi anggaran.
Keandalan	Penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas	Kurang Baik	Keterbatasan dalam pengelolaan aset tanah menyebabkan laporan keuangan kurang dapat diandalkan.
Dapat dibandingkan	Perbandingan antar tahun, konsistensi	Baik	Adanya konsistensi dalam penerapan standar akuntansi, sehingga laporan dapat dibandingkan.
Dapat dipahami	Kemudahan pemahaman laporan	Cukup Baik	Struktur laporan sesuai SAP, tetapi sebagian penyusun laporan keuangan bukan dari latar belakang akuntansi.

Dari hasil analisis menggunakan Teori Mahmudi, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi telah melakukan upaya yang baik dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam pengelolaan aset dan belanja modal yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencapai opini audit yang lebih baik.

3.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Kota Bekasi

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pejabat terkait dalam pengelolaan keuangan, serta auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan beberapa faktor utama yang memengaruhi kualitas laporan keuangan di Kota Bekasi. Faktor-faktor ini mencakup pengelolaan aset, sistem informasi keuangan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM).

1. Pengelolaan Aset

Salah satu faktor terbesar yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengelolaan aset, khususnya terkait dengan tanah dan bangunan. Temuan dari BPK pada tahun 2021 dan 2022 menyebutkan bahwa penatausahaan aset tanah masih belum memadai, yang berdampak pada laporan keuangan yang kurang akurat. Wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Bekasi mengungkapkan bahwa, “Pengelolaan aset tanah yang tersebar di berbagai wilayah memerlukan waktu dan koordinasi yang lebih baik

antar unit pengelola, sehingga masih banyak aset yang belum tercatat dengan lengkap.” Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam laporan aset yang akhirnya berpengaruh pada opini audit yang diberikan oleh BPK.

2. Sistem Informasi Keuangan

Meskipun Pemerintah Kota Bekasi telah berupaya untuk memperbaiki sistem informasi keuangan, keterbatasan integrasi antara berbagai sistem yang digunakan di berbagai unit pemerintahan masih menjadi kendala utama. Wawancara dengan salah satu pejabat BPKAD menunjukkan bahwa, “Sistem informasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi antara BPKAD dengan unit pengelola keuangan lainnya, sehingga menyebabkan adanya inkonsistensi dalam pencatatan dan pelaporan.” Hal ini mengarah pada kesulitan dalam memperoleh data yang tepat dan akurat, yang pada akhirnya mengurangi kualitas laporan keuangan yang disajikan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan dalam kapasitas SDM menjadi salah satu hambatan utama dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Banyak pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya memahami standar akuntansi pemerintah, yang menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporan. Tidak ada laporan keuangan yang sempurna, tetapi seorang akuntan bekerja keras untuk membuat laporan keuangan yang memberikan manfaat bagi pihak yang menggunakannya (Agustina, 2024). Wawancara dengan seorang auditor BPK menyatakan, “Terkadang kesalahan dalam laporan keuangan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga karena kurangnya pelatihan yang memadai bagi sumber daya manusia di level pengelola keuangan.” Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk para pegawai BPKAD sangat diperlukan untuk memastikan penyusunan laporan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

3.3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperoleh opini audit yang lebih baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta pejabat terkait lainnya, terdapat beberapa langkah strategis yang telah diambil untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah, meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengelolaan aset dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

1. Peningkatan Pengelolaan Aset

Salah satu langkah utama yang diambil oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan memperbaiki pengelolaan aset, khususnya aset tanah yang selama ini menjadi salah satu temuan utama dalam audit BPK. Wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Bekasi menyebutkan, “Kami telah memulai penataan ulang aset tanah yang belum tercatat dengan baik, dan terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa semua aset tercatat dengan akurat.” Upaya ini melibatkan verifikasi ulang atas aset tanah yang tersebar di berbagai wilayah kota dan memastikan bahwa semua aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tercatat dalam laporan keuangan yang tepat.

2. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kemampuan SDM dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, kualitas audit adalah kapasitas auditor untuk mendeteksi terjadinya kesalahan material dan bentuk penyimpangan pada penyajian laporan akuntansi (Oktariswan & Yuliyanti, 2020). Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan penerapan sistem yang lebih efisien dapat memperbaiki proses penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat. (Koç, 2025). Pemerintah Kota Bekasi melalui BPKAD telah mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola keuangan daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang staf BPKAD, “Kami sudah melakukan pelatihan secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, agar mereka lebih memahami standar akuntansi pemerintah.” Meskipun pelatihan ini sudah dilakukan, masih diperlukan penguatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh staf memiliki pemahaman yang kuat mengenai standar akuntansi yang terbaru dan dapat menerapkannya dengan konsisten.

3. **Perbaikan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Aset**

Pemerintah Kota Bekasi juga telah berupaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dengan memperkenalkan sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi dan efisien. Dalam wawancara dengan Kepala BPKAD, dijelaskan, “Kami sedang dalam proses mengimplementasikan sistem informasi yang lebih modern untuk memudahkan pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan secara lebih transparan dan akurat.” Meskipun implementasi sistem informasi ini masih dalam tahap pengembangan, langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan mempermudah proses verifikasi data.

4. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Untuk memastikan laporan keuangan yang lebih transparan, Pemerintah Kota Bekasi juga telah mengusahakan penyajian laporan yang lebih terbuka kepada publik. Wawancara dengan salah satu auditor BPK mengungkap bahwa, “Transparansi laporan keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas. Kami melihat adanya perbaikan dalam penyajian laporan keuangan yang lebih mudah diakses oleh publik.” Namun, meskipun langkah-langkah ini sudah mulai diterapkan, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap laporan keuangan daerah.

5. **Peningkatan Keterbukaan dalam Evaluasi dan Pelaporan**

Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan evaluasi rutin terhadap laporan keuangan yang disusun setiap tahun. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang disajikan memenuhi standar yang ditetapkan dan untuk menemukan area yang masih memerlukan perbaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala BPKAD, “Evaluasi laporan keuangan secara rutin kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap temuan audit dari BPK dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki.” Proses evaluasi yang terorganisir dengan baik ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kekurangan dalam laporan keuangan dapat diperbaiki sebelum dipublikasikan.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai upaya yang signifikan

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencapai opini audit yang lebih baik. Peningkatan pengelolaan aset, penguatan SDM, implementasi sistem informasi keuangan yang lebih modern, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas merupakan langkah-langkah kunci yang telah diambil. Meskipun sudah ada perbaikan, masih terdapat tantangan besar yang perlu diatasi, terutama dalam hal integrasi sistem dan pengelolaan aset. Pemerintah Kota Bekasi perlu terus melanjutkan upaya ini dengan komitmen yang lebih kuat untuk mencapai opini audit yang lebih baik di masa depan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi mengalami peningkatan, namun tantangan besar dalam pengelolaan aset dan pelaporan belanja modal masih tetap ada. Meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan transparansi laporan, faktor pengelolaan aset tanah dan pengelolaan belanja modal masih menjadi masalah yang signifikan. Hasil opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam kualitas laporan, pada tahun 2021 hingga 2023, BPK memberikan opini *Wajar Dengan Pengecualian* (WDP), yang mencerminkan adanya masalah dalam pengelolaan aset dan belanja modal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyu Setiyono (2016), yang menyatakan bahwa pengelolaan aset dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Setiyono menekankan bahwa pengelolaan aset yang buruk dapat mengurangi kualitas laporan keuangan, dan temuan ini juga tercermin dalam hasil penelitian di Kota Bekasi, di mana pengelolaan aset tanah yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bekasi memerlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai unit pengelola, yang masih belum tercapai dengan optimal. Meskipun ada upaya perbaikan, pengelolaan aset tanah tetap menjadi kendala utama yang harus segera diatasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperoleh opini audit yang lebih baik.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Gusherinsya & Samukri (2020) mengenai penerapan standar akuntansi pemerintah juga sejalan dengan temuan dalam penelitian ini. Mereka menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi yang tepat memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, meskipun penerapan standar akuntansi sudah dilakukan dengan baik di Kota Bekasi, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam konsistensi penerapannya antar unit pengelola keuangan yang berbeda. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam laporan keuangan dan mengurangi keterbandingan antar laporan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi yang baik saja tidak cukup untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang optimal; dibutuhkan juga koordinasi yang lebih baik antar unit pengelola keuangan.

Penelitian oleh Rohila Apriani & Henny Yulsiati (2024) yang menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan juga relevan, namun terdapat perbedaan dengan temuan penelitian ini. Meskipun laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi disampaikan tepat waktu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan pelaporan belanja modal tetap menjadi hambatan utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan opini audit. Meskipun ketepatan waktu berperan penting dalam penerimaan opini audit yang baik, temuan ini menunjukkan bahwa faktor internal lainnya, seperti pengelolaan aset yang buruk dan ketidaksesuaian dalam belanja modal, memiliki dampak yang lebih besar

terhadap opini audit yang diberikan oleh BPK.

Temuan penelitian oleh Rifqiansyah, Munir, dan Afrianto (2023) mengenai pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan juga sejalan dengan temuan penelitian ini. Mereka menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada pelatihan untuk SDM di BPKAD Kota Bekasi, kompetensi SDM dalam mengelola laporan keuangan masih menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah dilakukan, masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Namun, meskipun temuan-temuan di atas sejalan dengan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati et al. (2020) mengenai kualitas audit dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ermawati et al. menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Meskipun kualitas audit yang dilakukan oleh BPK sudah memadai, penelitian ini menemukan bahwa masalah dalam pengelolaan aset dan belanja modal di Kota Bekasi mengurangi efektivitas audit tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun audit yang dilakukan sudah sesuai standar, masalah pengelolaan aset dan belanja modal tetap mengurangi efektivitas audit dan kualitas laporan keuangan.

Di sisi lain, temuan dari Sabo et al. (2024) mengenai pengaruh adopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik di Nigeria juga relevan, tetapi tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan di Kota Bekasi. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan melalui penerapan standar yang lebih baik, pengelolaan aset dan ketepatan pelaporan belanja modal di Kota Bekasi tetap menjadi penghalang utama dalam mencapai kualitas laporan yang optimal. Ini menunjukkan bahwa meskipun adopsi standar internasional seperti IPSAS dapat membantu meningkatkan akuntabilitas, pengelolaan internal yang lebih baik tetap menjadi kunci utama.

Terakhir, penelitian Gardi et al. (2021) mengenai faktor-faktor hukum, bisnis, dan regulasi yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di wilayah Kurdistan juga menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti regulasi dan pengawasan berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, temuan penelitian ini di Kota Bekasi menunjukkan bahwa faktor internal, terutama pengelolaan aset dan belanja modal, lebih berpengaruh dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun faktor eksternal berperan, masalah pengelolaan keuangan internal yang buruk tetap mendominasi.

Secara keseluruhan, meskipun penelitian ini sejalan dengan beberapa temuan penelitian terdahulu, ada beberapa temuan yang tidak sepenuhnya sejalan. Temuan utama dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan aset yang lebih baik, pelatihan SDM yang berkelanjutan, dan koordinasi antar unit pengelola keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencapai opini audit yang lebih baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun ketepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas audit penting, faktor internal pengelolaan keuangan tetap menjadi hambatan utama yang perlu diperbaiki.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi mengalami beberapa peningkatan yang terlihat dari opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2019 dan 2020, Kota Bekasi menerima opini *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan baik. Namun, pada tahun 2021 hingga 2023, opini audit berubah menjadi *Wajar Dengan Pengecualian* (WDP), yang menunjukkan adanya masalah yang signifikan dalam pengelolaan aset dan pelaporan belanja modal. Meskipun demikian, pengelolaan aset dan pelaporan belanja modal tetap menjadi hambatan utama yang mengurangi kualitas laporan keuangan, terutama terkait dengan pengelolaan aset tanah yang belum tercatat dengan benar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Bekasi meliputi kompetensi SDM, pengelolaan aset, dan sistem informasi keuangan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Meskipun pelatihan SDM dilakukan secara rutin, kompetensi yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan dan kurangnya konsistensi penerapan standar akuntansi di seluruh unit pengelola keuangan menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan meliputi perbaikan dalam pengelolaan aset, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan transparansi laporan keuangan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan dalam koordinasi antar unit pengelola keuangan, serta pengelolaan aset yang tidak optimal. Hal ini mengarah pada ketidakakuratan dalam pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan yang akhirnya mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan ruang lingkup, yang hanya terfokus pada laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi selama periode 2019-2023. Selain itu, informan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling, yang membatasi generalisasi temuan penelitian ke daerah lain.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work) Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan keuangan di daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Penelitian komparatif yang melibatkan beberapa daerah di Indonesia dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan opini audit yang diberikan oleh BPK. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi pengembangan sistem informasi keuangan yang lebih efisien dan penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan..

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan yang sangat berarti dalam melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh informan, baik informan utama maupun pendukung, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga serta berbagi pengalaman selama proses pengumpulan data. Tanpa kontribusi dari para informan, penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (2024). The Role Of Financial Reporting In Companies. *Journal of Management*, 3(1), 85–88. Retrieved from <https://myjournal.or.id/index.php/JOM>
- Ermawati, L., Devi, Y. D., & Arramadani, N. N. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 92. <https://doi.org/10.36448/jak.v11i1.1406>
- Gardi, B., Hamza, P. A., Qader, K. S., Hamad, H. A., & Anwar, D. G. (2021). Factors affecting the quality of financial statements on investment decision making. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 6(5), 224–235. <https://doi.org/10.22161/ijels.65.35>
- Gusherinsya, R., & Samukri, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 58–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.94>
- Haji-Abdullah, N. M., Othman, R., & Marzuki, M. M. (2017). Non-audit services, audit opinion, cultural, affiliated directors and fraudulent financial reporting: Evidence from Malaysia. *Advanced Science Letters*, 23(1), 665–669. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.7291>
- Herda, D. N., Notbohm, M. A., & Dowdell, T. D. (2014). The effect of external audits of internal control over financial reporting on financial reporting for clients of Big 4, Second-tier, and small audit firms. *Research in Accounting Regulation*, 26(1), 98–103. <https://doi.org/10.1016/j.racreg.2014.02.010>
- Rifqiansyah, L., Munir, R., & Afrianto, dan. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas. *MARS Journal*, 3(2), 87–109.
- Koç, A. (2025). The financial reporting framework and intellectual capital. *Current Issues in Accounting*, (May), 357–362.
- Kusnadi, Y., Leong, K. S., Suwardy, T., & Wang, J. (2016). Audit Committees and Financial Reporting Quality in Singapore. *Journal of Business Ethics*, 139(1), 197–214. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2679-0>
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (kedua). UPP STIM YKPN
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). **Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods**. Beverly Hills, CA: Sage Publications
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Oktariswan, D., & Yuliyanti, R. (2020). Peran Kualitas Audit Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Auditor Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Star. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 93, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6831>
- Sabo, J. G., Ugwudioha, O., & Wayas, J. P. (2024). Effect of Adoption of International Public Sector Accounting Standards on Quality of Financial Reports in the Public Sector in Nigeria. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(7), e3772. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i7.3772>
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryanto, E., Suwanda, D., Agustina, I., & Irawan, I. (2020). Performance Model of Auditors and Supervisors in the Inspectorates Government Indonesia. *Solid State Technology*, 63(3).
Wahyu Setiyono. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI, 1–23.

